

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya terhadap komoditas bernilai strategis seperti nikel, telah menjadi kebijakan utama yang menandai arah pembangunan ekonomi nasional Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi pendekatan hilirisasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri melalui pembangunan fasilitas pemurnian (smelter), pelarangan ekspor bahan mentah, serta peningkatan peran domestik dalam rantai pasok global. Kebijakan ini secara signifikan memberikan dampak terhadap perekonomian di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, dibalik pertumbuhan tersebut juga muncul beragam persoalan sosial-ekologis baru yang menimbulkan perdebatan publik mengenai keberlanjutan dan keadilan kebijakan ini (Winardi, 2024).

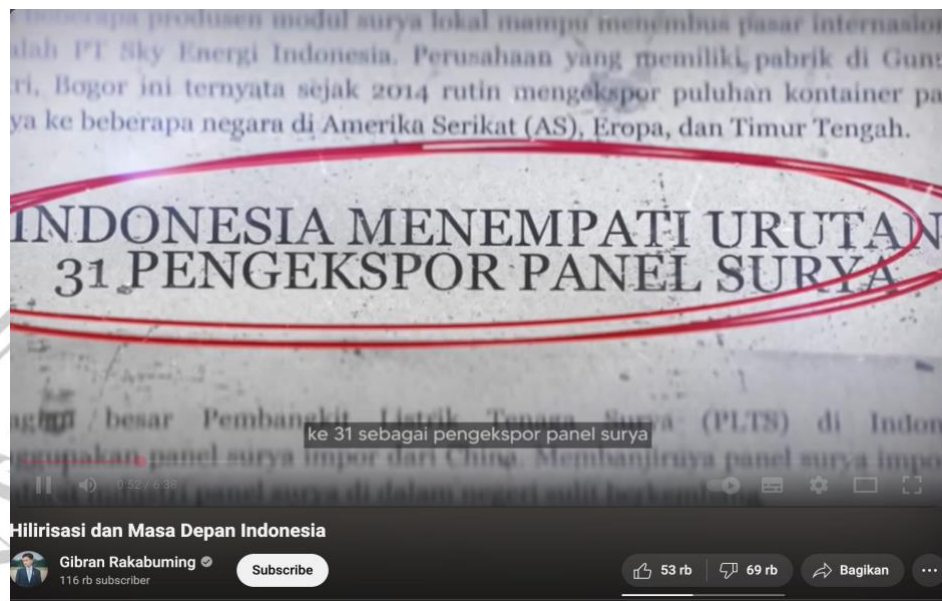
Secara makro, program hilirisasi nikel tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik seperti pembangunan smelter dan kawasan industri, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi geoekonomi nasional yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok industri kendaraan listrik global dan produksi baterai. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan bukan hanya kebijakan industri dan investasi yang komprehensif, tetapi juga legitimasi politik yang kuat guna mengatasi resistensi dari aktor-aktor ekonomi global. Hal ini terbukti dari adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel mentah dari Indonesia, yang menimbulkan perdebatan mengenai kedaulatan sumber daya alam dan prinsip perdagangan bebas (Jason dkk., 2024)

Dalam konteks domestik, kebijakan hilirisasi membutuhkan dukungan dan pemahaman dari masyarakat luas agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran komunikasi politik menjadi sangat krusial dalam membentuk narasi dan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Di sinilah peran Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia menjadi sangat signifikan untuk diamati. Sebagai bagian dari kepemimpinan nasional, Gibran tidak hanya berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga dalam membangun legitimasi politik dan memperkuat narasi hilirisasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi bangsa. Menurut Liputan6.com (2024), Gibran menekankan pentingnya pembangunan industri dalam negeri sebagai fondasi menuju kemandirian dan masa depan ekonomi Indonesia yang berdaya saing global.

Salah satu media yang secara konsisten digunakan oleh Gibran dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya adalah platform YouTube. Sosial media ini memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi dalam format audio-visual yang lebih menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat lintas usia dan latar belakang pendidikan. Melalui berbagai konten di channel YouTube pribadinya, Gibran kerap kali menampilkan kunjungan ke kawasan industri hilirisasi, melakukan dialog dengan pelaku usaha, serta pernyataan-pernyataan yang menekankan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta memperkuat daya saing ekonomi nasional (Ashar dkk., 2024).

Dalam era digital, media sosial telah menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk tidak hanya menerima pesan politik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini publik melalui diskusi, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah (Nurhidayat & Garis, 2023). Platform seperti YouTube memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan tanggapan mereka melalui fitur *like*, *dislike*, dan kolom komentar, yang mencerminkan beragam bentuk penerimaan terhadap pesan politik yang disampaikan. Dalam *channel* YouTube Gibran Rakabuming, terdapat beberapa konten yang membahas isu hilirisasi. Jika diperhatikan dan diamati dengan

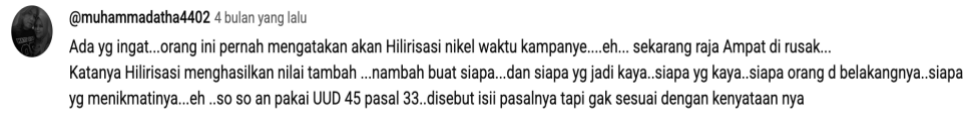
seksama, bahwa tidak semua konten mendapatkan respon yang sama dari khalayak. Perbedaan jumlah *like* dan *dislike* serta isi komentar menunjukkan adanya variasi penerimaan publik terhadap pesan yang disampaikan. Empat konten yang akan dibahas berikut menjadi representasi dari perbedaan persepsi khalayak terhadap isu hilirisasi.



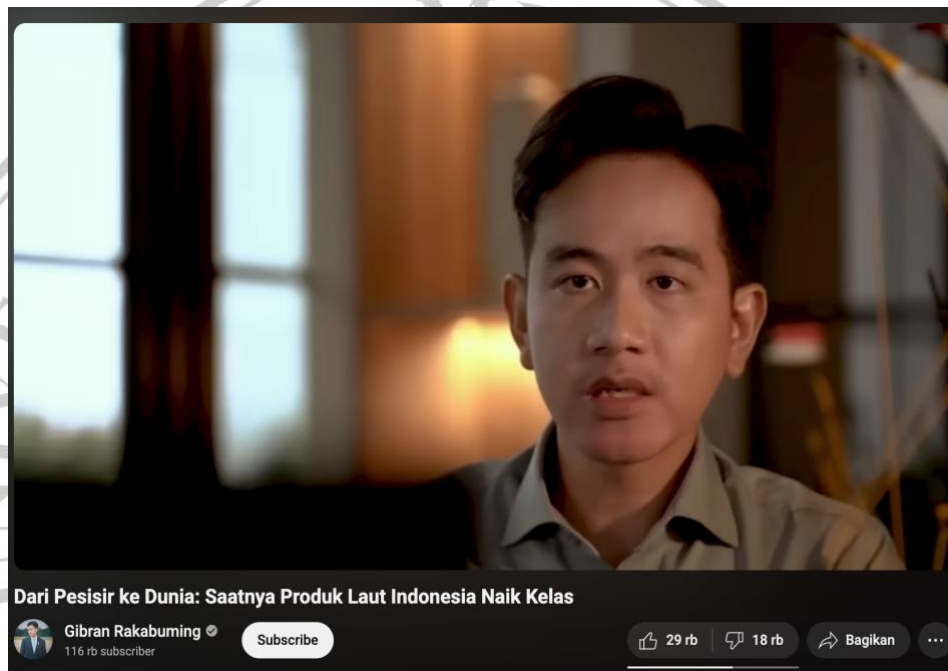
Gambar 1.1 Judul Konten Pertama dan Jumlah *Like/Dislike*

Konten pertama yang diunggah di *channel* YouTube Gibran Rakabuming berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia yang dipublikasikan pada 25 April 2025 dengan jumlah *view* 557.329 (data pada tanggal 10 Oktober 2025). Dalam video tersebut, Gibran menyoroti isu hilirisasi nikel sebagai langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan ini dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah. Namun, video ini menimbulkan respons yang cukup kontroversial dari penonton, terlihat dari jumlah *dislike* yang lebih banyak dibandingkan *like* serta munculnya sejumlah komentar bernada kritis. Salah satu pengguna YouTube @muhammadatha4402 menulis, “Katanya hilirisasi menghasilkan nilai tambah... nambah buat siapa... dan siapa yang jadi kaya... siapa orang di belakangnya... siapa yang menikmatinya... eh... so-soan pakai UUD 45 pasal 33... disebut isi pasalnya tapi gak sesuai dengan kenyataannya”. Komentar ini menunjukkan adanya skeptisisme publik terhadap pelaksanaan

hilirisasi, terutama terkait dengan distribusi manfaat ekonomi yang dianggap tidak merata. Penolakan ini kemungkinan muncul karena kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas sosial yang dialami masyarakat di lapangan.



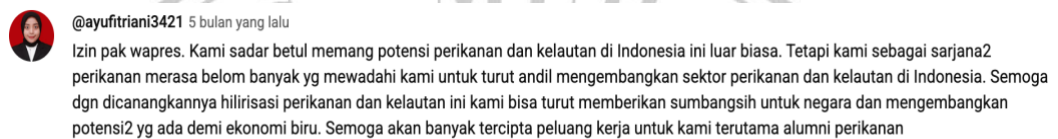
Gambar 1.2 Komentar Konten Pertama



Gambar 1.3 Judul Konten Kedua dan Jumlah *Like/Dislike*

Konten kedua yang diunggah di *channel* YouTube Gibran Rakabuming berjudul Dari Pesisir ke Dunia: Saatnya Produk Laut Indonesia Naik Kelas yang dipublikasikan pada 30 April 2025 dengan jumlah *view* 146.116 (data pada tanggal 10 Oktober 2025). Video ini menampilkan Gibran yang membahas mengenai hilirisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai bagian dari strategi ekonomi biru nasional. Dalam penyampaiannya, Gibran menekankan pentingnya pengembangan potensi sumber daya laut untuk memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Konten ini mendapat tanggapan positif dari khalayak, terlihat dari jumlah *like* yang lebih banyak dibandingkan *dislike* serta banyaknya komentar

yang mendukung kebijakan tersebut. Salah satu penonton @ayufitriyani3421 menulis, *“Izin Pak Wapres. Kami sadar betul memang potensi perikanan dan kelautan di Indonesia ini luar biasa... Semoga dengan dicanangkannya hilirisasi perikanan dan kelautan ini kami bisa turut memberikan sumbangsih untuk negara dan mengembangkan potensi-potensi yang ada demi ekonomi biru”*. Komentar ini menunjukkan adanya dukungan dan harapan publik terhadap kebijakan hilirisasi, terutama di kalangan generasi muda dan akademisi yang merasa memiliki peran dalam pengembangan sektor kelautan nasional.



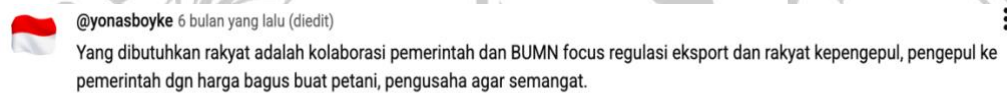
Gambar 1.4 Komentar Konten Kedua



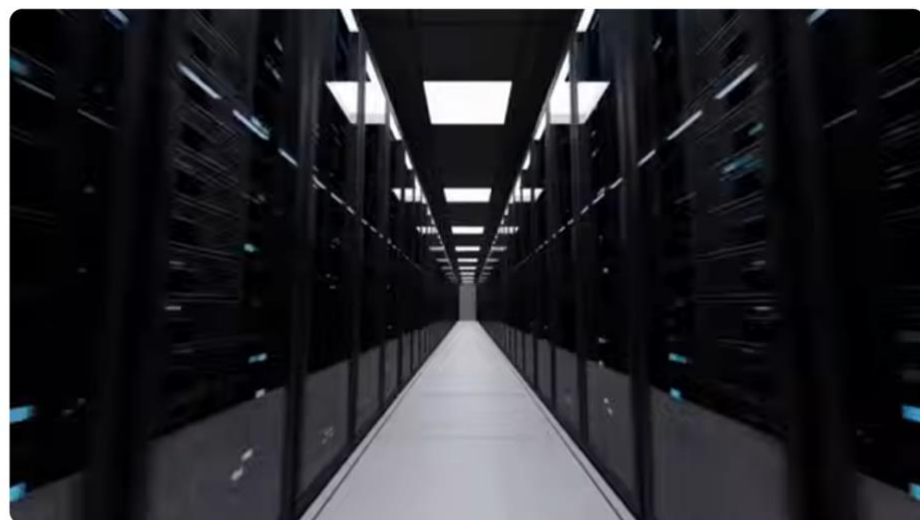
Gambar 1.5 Judul Konten Ketiga dan Jumlah *Like/Dislike*

Konten ketiga yang diunggah di *channel* YouTube Gibran Rakabuming berjudul Hilirisasi Pertanian: Swasembada Pangan dan Petani Naik Kelas yang dipublikasikan pada 10 Mei 2025 dengan jumlah *view* 162.823 (data pada tanggal 21 November 2025). Pada video ini membahas mengenai hilirisasi pertanian yang diarahkan untuk mendorong swasembada pangan serta

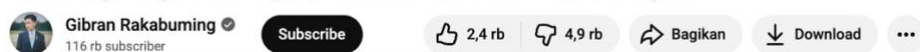
meningkatkan kesejahteraan dan posisi tawar petani. Di dalam kontennya, Gibran menyoroti berbagai tantangan struktural, termasuk ketidakpastian kebijakan yang semakin tinggi, yang selama ini menghambat stabilitas produksi dan pemasaran hasil pertanian. Konten ini mendapat tanggapan positif dari khalayak terlihat dari jumlah *like* yang lebih banyak dibandingkan *dislike* serta banyaknya komentar yang mendukung kebijakan tersebut. Salah satu penonton @yonasboyke menulis. “Yang dibutuhkan rakyat adalah kolaborasi pemerintah dan BUMN focus regulasi ekspor dan rakyat kepengpul, pengpul ke pemerintah dgn harga bagus buat petani, pengusaha agar semangat.”. Komentar ini menunjukkan bahwa khalayak memandang hilirisasi sebagai langkah positif, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek implementasi kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.



Gambar 1.6 Komentar Konten Ketiga



Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen Digital



Gambar 1.7 Judul Konten Keempat dan Jumlah *Like/Dislike*

Terakhir, Konten keempat yang diunggah di *channel* YouTube Gibran Rakabuming Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen

Digital yang dipublikasikan pada 26 Mei 2025 dengan jumlah *view* 39.182 (data pada tanggal 21 November 2025). Pada video tersebut menyajikan gagasan mengenai pentingnya transformasi digital di Indonesia, dengan menekankan bahwa Indonesia tidak seharusnya hanya berperan sebagai konsumen atau pasar digital, tetapi juga dituntut untuk menjadi produsen dalam ekosistem digital global. Pesan utama yang disampaikan Gibran dalam konten tersebut adalah urgensi pembangunan infrastruktur digital nasional, termasuk pusat data, pengembangan perangkat lunak, dan penciptaan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang teknologi informasi. Namun, video ini menimbulkan respons yang cukup kontroversial dari penonton, terlihat dari jumlah *dislike* yang lebih banyak dibandingkan *like* serta banyaknya komentar negatif dibandingkan komentar positif. Salah satu pengguna YouTube @iam_stanis menulis. “Terus apa hal konkret yang dilakukan pemerintah? Pusat Data Nasional yang masih bocor, menteri komdigi yang bahkan gak bisa bedain e-sport dengan game biasa, pembatasan nomor SIM... Bahkan presiden ndak pernah bahas hal-hal digital. Mas wapres mau apa sebenarnya?”. Komentar ini menunjukkan adanya keraguan publik terhadap efektivitas dan konsistensi kebijakan digital nasional, terutama terkait perbedaan antara wacana politik dan implementasi nyata.



@iam_stanis 5 bulan yang lalu

Terus apa hal konkret yang dilakukan pemerintah? Pusat Data Nasional yang masih bocor, menteri komdigi yang bahkan gak bisa bedain e-sport dengan game biasa, pembatasan nomor SIM, penyedia layanan IT yang harus daftar PSE, anak sekolah yang gak paham perkalian tapi sudah dijejeli AI, dan segala keribetan lain. Bahkan presiden ndak pernah bahas hal-hal digital. Mas wapres mau apa sebenarnya?

Gambar 1.8 Komentar Konten Keempat

Fenomena penggunaan media sosial sebagai arena komunikasi politik kini telah menjadi bagian dari transformasi dalam praktik politik kontemporer. Menurut kajian yang dilakukan oleh Mastuti dan Syarwi (2023), media sosial telah mengubah cara politisi menyampaikan pesan, di mana narasi kebijakan kini tidak lagi bergantung pada media konvensional, melainkan lebih banyak dibangun secara langsung oleh para aktor politik melalui platform digital. Dalam konteks ini, YouTube memainkan peran penting karena memungkinkan penyampaian pesan yang lebih naratif, disertai visualisasi, dan dapat

menjangkau khalayak luas dalam waktu yang singkat. Hal ini menjadikan YouTube sebagai medium strategis dalam membangun opini publik, terutama untuk isu-isu kompleks seperti hilirisasi yang memerlukan penjelasan mendalam.

Meskipun masih terdapat kesenjangan dalam literatur akademik terkait bagaimana khalayak menerima dan memaknai pesan politik yang disampaikan melalui media sosial. Pesan mengenai hilirisasi yang dikemas secara digital belum sepenuhnya diketahui tingkat penerimaannya oleh masyarakat, termasuk sejauh mana masyarakat mampu memahami konteks strategis dari kebijakan tersebut. Selain itu, masih ditemukan potensi ketidaksesuaian antara narasi pembangunan yang disampaikan secara *top-down* dengan pengalaman empiris masyarakat di tingkat lokal yang merasakan langsung dampak dari kegiatan industri hilirisasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penerimaan dan pemaknaan khalayak terhadap isu hilirisasi dalam ranah komunikasi digital masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

Sebagian besar studi terdahulu lebih menekankan pada aspek kebijakan makro hilirisasi, teknis pengembangan industri, serta implikasi ekonomi atau hukum internasional dari kebijakan tersebut. Penelitian mengenai aspek komunikasi kebijakan, khususnya dalam ranah media sosial digital dan strategi komunikasi politik dari aktor-aktor muda seperti Gibran Rakabuming, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang mampu menjembatani aspek komunikasi dan persepsi khalayak terhadap narasi kebijakan yang dibentuk melalui media digital.

Kehadiran Gibran Rakabuming dalam lanskap politik Indonesia membawa dinamika baru, tidak hanya karena posisinya sebagai anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo, tetapi juga karena ia mewakili generasi politik baru yang mengandalkan media digital sebagai alat utama komunikasi publik. Narasi hilirisasi yang dibawanya mencerminkan upaya untuk membingkai ulang isu ekonomi menjadi isu politik yang berorientasi pada masa depan. Akan tetapi, untuk memahami efektivitas strategi ini, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana khalayak sebagai penerima pesan menanggapi, memaknai, dan merefleksikan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan khalayak terhadap isu hilirisasi yang disampaikan melalui *channel* YouTube Gibran Rakabuming dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana pengurus aktif BEM FISIP Universitas Brawijaya periode 2025 sebagai khalayak menafsirkan dan memaknai pesan yang disampaikan Gibran dalam konten-konten bertema hilirisasi. Kajian ini akan menggali berbagai bentuk penerimaan, baik yang menunjukkan persetujuan, penolakan, maupun interpretasi negosiasi terhadap pesan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana penerimaan khalayak terhadap isu hilirisasi pada konten YouTube Gibran Rakabuming”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerimaan khalayak terhadap isu hilirisasi pada konten YouTube Gibran Rakabuming.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis resepsi khalayak di era media digital. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena serupa, terutama terkait dengan bagaimana pesan politik tentang kebijakan publik seperti isu hilirisasi yang disampaikan melalui platform digital seperti YouTube dan dimaknai oleh audiens muda.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerimaan khalayak terhadap isu hilirisasi yang disampaikan melalui media sosial, khususnya channel YouTube Gibran Rakabuming. Hasil penelitian ini

dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana penerimaan khalayak terhadap pesan politik yang beredar di ruang digital.

